

DAFTAR PUSTAKA

- Direktur Jenderal Pajak. 2010. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2010 Tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu*. Diakses dari: <http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=14326#top>
- Direktur Jenderal Pajak. 2016. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi*. Diakses dari: <http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=16133&hlm=>
- Direktur Jenderal Pajak. 2017. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 38/PJ/2017 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak*. Diakses dari: <http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=13834>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Realisasi APBN 2017*. Diakses dari: <https://www.kemenkeu.go.id/media/6860/realisasi-apbn-sampai-dengan-30-november-2017.pdf>
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi 2016*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*. Diakses dari: <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/UU-PPH-001-13-UU%20PPH%202013-00%20Mobile.pdf>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Diakses dari: <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/UU-KUP-001-13-UU%20KUP%202013-00%20Mobile.pdf>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara*

Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Diakses dari: <http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15652>

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat.

